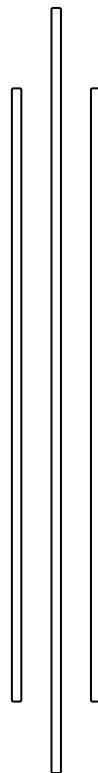




PERUBAHAN RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2025



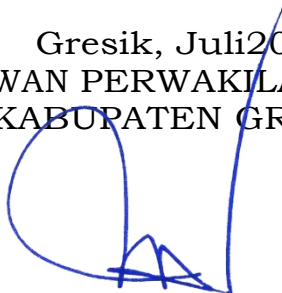
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, di samping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Gresik Tahun 2025 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025.

Gresik, Juli 2025
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK



Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680412 199203 1 011

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
1.4. Sistematika Penulisan	I-4
 BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	 II-1
2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II	II-5
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-13
 BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GRESIK	 III-1
 BAB IV : PENUTUP	 IV-1

BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem perencanaan pembangunan nasional termasuk daerah diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang – Undang ini selanjutnya dijabarkan secara teknis menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 dilakukan sebagai respons atas perubahan arah kebijakan pemerintah daerah, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan tahun berjalan, serta kebutuhan riil dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik (Sekretariat DPRD) sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.

Dokumen Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP),

Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Gresik.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun ketentuan Peraturan Perundangan sebagai landasan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025, antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam rangka

memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Gresik untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebagai implementasi visi dan misi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

B. TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah untuk :

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan Visi, Misi Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 ke dalam rencana Instansional sebagai tujuan, sasaran dan program kerja operasional;
3. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektifitas penggunaan sumber daya organisasi;
4. Menjadi bahan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
5. Sebagai Sarana pengendalian Program dan Kegiatan tahun 2025 dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang mendasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan dan penulisan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

2.3. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

2.5. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GRESIK

BAB IV : PENUTUP

BAB II

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik. Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik memiliki 4 (empat) bagian yaitu:

a. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengkoordinasian pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga kesekretariatan DPRD dan keanggotaan DPRD. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Umum mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga Sekretariat DPRD dan administrasi keanggotaan DPRD;
2. Pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, sarana dan prasarana perlengkapan dan rumah tangga;
3. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, pelayanan kesehatan dan pakaian dinas kesekretariatan dan anggota DPRD;
4. Penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab Sekretariat DPRD;

5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

b. Bagian Program dan Keuangan

Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengkoordinasian dalam mendukung DPRD di bidang pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perbendaharaan, verifikasi, dan laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian penyusunan program, anggaran, perbendaharaan dan pelaporan keuangan;
2. Pelaksanaan pengkoordinasian kebijakan di bidang program, anggaran, perbendaharaan dan pelaporan keuangan;
3. Pelaksanaan pengendalian penatausahaan keuangan;
4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi evaluasi kinerja program, anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan keuangan;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengkoordinasian pelayanan dukungan DPRD dalam pelaksanaan persidangan dan perundang – undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pelaksanaan persidangan, penyiapan *draft* Peraturan Daerah inisiatif, penyusunan risalah rapat dan mengkaji rumusan rapat;
2. Pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian pelaksanaan persidangan, penyiapan *draft* Peraturan Daerah inisiatif, penyusunan risalah rapat dan mengkaji rumusan rapat;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan persidangan, penyiapan *draft* Peraturan Daerah inisiatif, penyusunan risalah rapat dan mengkaji rumusan rapat;

4. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan persidangan, penyiapan *draft* Peraturan Daerah inisiatif, penyusunan risalah rapat dan mengkaji rumusan rapat;
5. Pelaksanaan penyelenggaraan dukungan analisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
6. Pelaksanaan pelayanan penyediaan bahan dan penyelenggaraan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD.

d. Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi

Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD. Dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pelayanan administrasi hubungan masyarakat dan pelayanan keprotokolan pimpinan dan anggota DPRD;
2. Pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian pelayanan administrasi hubungan masyarakat dan pelayanan keprotokolan pimpinan dan anggota DPRD;
3. Pemberian dukungan pelayanan administrasi hubungan masyarakat dan pelayanan keprotokolan pimpinan dan anggota DPRD;
4. Pembinaan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi hubungan masyarakat dan pelayanan keprotokolan pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD berdasarkan pada tolak ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD terdapat dalam Tabel 2.7 (T-C.30) di bawah ini:

Tabel 2.1 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Gresik

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023 (n-2)	2024 (n-1)	2025 (n)	2026 (n+1)	2023 (n-2)	2024 (n-1)	2025 (n)	2026 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah			A	A	A	A	A	A	A	A	
2	Persentase Ketercapaian Sasaran Program Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyusunan Regulasi DPRD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran DPRD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan DPRD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Nilai Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			A	A	A	A	A	A	A	A	

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

Gambaran realisasi pelaksanaan rencana kerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Gresik
Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik
Periode Pelaksanaan : Tahun 2025**

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja Sekretariat DPRD :

Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
						I		II							
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	SEKRETARIAT DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	106.574.493.139,93	10%	16.724.512.433,19	10%	18.941.708.513,44	19%	35.666.220.946,63	19%	33,47%	SEKRETARI AT DPRD	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				51.540.923.306,93		10.642.931.662,19		10.250.161.414		20.893.093.077		40,54%		
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	30 Dokumen	459.323.126,00	11	83.496.223,00	4	92.882.422,00	15	176.378.645	50%	38,40%	Bagian Program dan Keuangan	
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	202.961.850,00	3	46.281.223,00	0	53.785.422,00	3	100.066.645	33%	49,30%		
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	172.674.000,00	5	16.258.000,00	4	19.079.000,00	9	35.337.000	53%	20,46%		
3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	83.687.276,00	3	20.957.000,00	0	20.018.000,00	3	40.975.000	75%	48,96%		
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	1.253 Dokumen	6.248.373.445,93	194	1.406.599.972,19	345	1.495.056.061,44	539	2.901.656.034	43%	46,44%	Bagian Program dan Keuangan	
4		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bln	5.975.367.445,93	31	1.328.818.872,19	31	1.442.982.561,44	31	2.771.801.434	103%	46,39%		
5		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1.238 Dokumen	231.208.000,00	180	67.566.100,00	335	49.133.500,00	515	116.699.600	42%	50,47%		
6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	17.858.000,00	5	7.695.000,00	0	2.490.000,00	5	10.185.000	100%	57,03%		
7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9 Laporan	15.690.000,00	9	2.520.000,00	9	450.000,00	9	2.970.000	100%	18,93%		

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket	
						I		II								
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	Rp.	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	K	Rp.	10	11
8	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	8.250.000,00	0	-	1	-	1	-	100%	0,00%			
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	17 Dokumen	142.895.530,00	5	16.256.960,00	14	38.070.500,00	19	54.327.460	28%	38,02%	Kepala Bagian Umum		
9		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen	5.090.500,00	3	-	7	-	10	-	59%	0,00%			
10		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	117.361.030,00	2	16.256.960,00	5	32.635.500,00	7	48.892.460	54%	41,66%			
11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	20.444.000,00	0	-	2	5.435.000,00	2	5.435.000	40%	26,58%			
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan	230 Dokumen	990.928.309,00	17	144.245.886,00	18	98.257.000,00	287	242.502.886	125%	24,47%	Kepala Bagian Umum		
12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	92.650.000,00	0	-	0	-	0	-	0%	0,00%			
13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	180.375.278,00	0	-	0	-	0	-	0%	0,00%			
14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	74.631.712,00	0	7.400.000,00	1	40.635.500,00	1	48.035.500	100%	64,36%			
15		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	74 Paket	82.254.324,00	14	12.820.000,00	16	12.313.000,00	30	25.133.000	41%	30,56%			
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	182.723.575,00	3	2.309.000,00	1	8.690.000,00	4	10.999.000	80%	6,02%				
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	132 Laporan	103.515.500,00	120	28.974.600,00	120	18.860.000,00	240	47.834.600	182%	46,21%				
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	165.145.920,00	9	75.342.286,00	2	6.758.500,00	11	82.100.786	73%	49,71%				
19	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	109.632.000,00	1	17.400.000,00	0	11.000.000,00	1	28.400.000	100%	25,90%				
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	2 Unit	4.984.288.601,00	0	-	2	-	2	-	100%	0,00%	Kepala Bagian Umum			
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4.984.288.601,00	0	-	2	-	2	-						
6	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	137 Laporan	2.630.492.000,00	77	630.334.025,00	77	454.407.012,00	154	1.084.741.037	112%	41,24%	Kepala Bagian Umum			
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	27.716.000,00	12	2.910.000,00	13	5.600.000,00	25	8.510.000	50%	30,70%				
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	325.560.000,00	3	94.928.707,00	3	92.837.364,00	6	187.766.071	50%	57,67%				
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	75 Laporan	2.277.216.000,00	74	532.495.318,00	74	355.969.648,00	74	888.464.966	99%	39,02%				
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	85 Unit	1.062.532.084,00	31	112.016.198,00	7	194.398.998,00	38	306.415.196	45%	28,84%	Kepala Bagian Umum			

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
						I		II							
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11
24		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	171.341.000,00	4	25.571.598,00	0	49.396.162,00	1	74.967.760	100%	43,75%		
25		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	229.000.000,00	13	71.708.150,00	2	105.496.136,00	4	177.204.286	25%	77,38%		
26		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	5.000.000,00	11	-	0	-	3	-	6%	0,00%		
27		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 Unit	109.795.000,00	0	7.986.450,00	0	29.381.700,00	0	37.368.150	0%	34,03%		
28		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	269.219.000,00	2	-	5	-	2	-	88%	0,00%		
29		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	278.177.084,00	1	6.750.000,00	0	10.125.000,00	0	16.875.000	6%	6,07%		
8		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	50 Orang	34.869.950.211,00	3	8.249.982.398,00	2	7.847.511.461,00	5	16.097.493.859	10%	46,16%	Kepala Bagian Umum	
30		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	34.218.950.211,00	50	8.249.982.398,00	50	7.842.885.961,00	50	16.092.868.359	100%	47,03%		
31		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	576.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0%	0,00%		
32		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	75.000.000,00	3	-	2	4.625.500,00	5	4.625.500	10%	6,17%		
9		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah laporan pelayanan administrasi DPRD yang terpenuhi	10 Laporan	152.140.000,00	3	-	4	29.577.960,00	7	29.577.960	70%	19,44%	Kepala Bagian Umum	
33		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	5 Dokumen	50.000.000,00	0	-	1	2.449.960,00	1	2.449.960	20%	4,90%		
34	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	5 Laporan	102.140.000,00	3	-	3	27.128.000,00	6	27.128.000	120%	26,56%			
Rata - rata capaian kinerja (%)												64,76	31,45		
Predikat Kinerja												Rendah	Sangat Rendah		
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			720 kali	55.033.569.833,00	180	6.081.580.771,00	183	8.691.547.099,00	356	14.773.127.870		26,84%		
10	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah dokumen hasil kegiatan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	16 Dokumen	20.014.431.727,00	1	1.851.397.560,00	3	4.551.852.340,00	4	6.403.249.900,00	25%	31,99%	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	
35		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	387.161.000,00	1	17.038.000,00	0	3.018.500,00	1	20.056.500,00	50%	5,18%		
36		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	2.809.032.300,00	0	2.583.000,00	3	471.808.220,00	3	474.391.220,00	38%	16,89%		

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
						I		II							
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5	Rp.	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	11
37		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	790.000.000,00	0	-	0	6.074.000,00	0	6.074.000,00	0%	0,77%		
38		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen	2.500.825.827,00	0	-	0	3.683.500,00	0	3.683.500	0%	0,15%		
39		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	224.647.800,00	0	-	0	-	0	-	0%	0,00%		
40		Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	120.000 Orang	13.302.764.800,00	0	1.831.776.560,00	0	4.067.268.120,00	0	5.899.044.680	0%	44,34%		
11	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan hasil kegiatan pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi	26 Dokumen	1.788.365.000,00	0	-	4	43.549.310,00	4	43.549.310	15%	2,44%	Kepala Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi	
41		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4 Dokumen	355.271.450,00	0	-	0	-	0	-	0%	0,00%		
42		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4 Dokumen	351.002.650,00	0	-	0	-	0	-	0%	0,00%		
43		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	6 Dokumen	346.278.450,00	0	-	0	-	0	-	0%	0,00%		
44		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4 Dokumen	356.102.550,00	0	-	0	-	0	-	0%	0,00%		
45		Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	4 Dokumen	46.754.700,00	0	-	0	-	0	-	0%	0,00%		
46		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4 Dokumen	332.955.200,00	0	-	4	43.549.310,00	4	43.549.310	100%	13,08%		
12	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi	251 Laporan	13.199.944.000,00	76	2.215.749.600,00	68	1.713.387.213,00	144	3.929.136.813	57%	29,77%	Kepala Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi	
47		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	60 Laporan	3.001.145.250,00	20	539.047.000,00	16	396.910.219,00	36	935.957.219	60%	31,19%		
48		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	60 Laporan	3.179.565.900,00	18	627.137.000,00	17	438.672.834,00	35	1.065.809.834	58%	33,52%		
49		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	60 Laporan	3.071.002.750,00	14	502.489.500,00	16	416.510.100,00	30	918.999.600	50%	29,93%		
50		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	60 Laporan	3.205.964.900,00	22	538.517.600,00	13	406.723.500,00	35	945.241.100	58%	29,48%		
51		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Laporan	343.878.350,00	0	-	0	-	0	-	0%	0,00%		
52		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	6 Dokumen	29.217.200,00	2	5.908.500,00	2	5.965.000,00	4	11.873.500,00	67%	40,64%		
53		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4 Dokumen	369.169.650,00	0	2.650.000,00	4	48.605.560,00	4	51.255.560,00	100%	13,88%		

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
						I		II							
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11
13	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang difasilitasi	7 Dokumen	2.269.808.050,00	3	464.627.000,00	0	302.130.500,00	3	766.757.500,00	43%	33,78%	Kepala Bagian Fasilitas, Kerjasama dan Aspirasi	
54		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	4 Dokumen	768.392.200,00	2	187.957.000,00	0	67.500.000,00	2	255.457.000,00	50%	33,25%		
55		Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	1.501.415.850,00	1	276.670.000,00	0	234.630.500,00	1	511.300.500,00	33%	34,05%		
14		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi	2 Laporan	45.960.000,00	1	6.357.500,00	0	-	1	6.357.500	50%	13,83%	Kepala Bagian Fasilitas, Kerjasama dan Aspirasi	
56		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	45.960.000,00	1	6.357.500,00	0	-	1	6.357.500,00	50%	13,83%		
15	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah dokumen hasil kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	292 Dokumen	8.833.032.217,00	70	758.189.510,00	71	889.711.060,00	135	1.647.900.570,00	46%	18,66%	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	
57		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	3.973.465.156,00	1	399.473.010,00	2	192.473.060,00	3	591.946.070,00	50%	14,90%		
58		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	252.530.000,00	6	36.000.000,00	6	57.000.000,00	6	93.000.000,00	86%	36,83%		
59		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	24 Dokumen	152.490.000,00	12	15.680.000,00	6	36.100.000,00	18	51.780.000	75%	33,96%		
60		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	383.042.400,00	0	-	0	-	0	-	0%	0,00%		
61		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi DPRD	261 Dokumen	4.071.504.661,00	63	307.036.500,00	63	604.138.000,00	126	911.174.500	48%	22,38%		
16		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas DPRD	128 Dokumen	8.882.028.839,00	29	785.259.601,00	37	1.190.916.676,00	66	1.976.176.277	52%	22,25%	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	
62		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	3.344.540.000,00	4	453.630.101,00	8	772.275.565,00	12	1.225.905.666	100%	36,65%		
63		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	6 Laporan	386.402.400,00	3	1.950.000,00	3	57.140.000,00	6	59.090.000	100%	15,29%		
64		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	24 Dokumen	18.962.400,00	2	1.855.000,00	4	3.695.000,00	6	5.550.000	25%	29,27%		
65		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	86 Dokumen	5.132.124.039,00	20	327.824.500,00	22	357.806.111,00	42	685.630.611	49%	13,36%		
Rata - rata capaian kinerja (%)												41,20	21,82		
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program					106.574.493.139,93						35.666.220.947				
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												52,98	26,63		
Predikat Kinerja												Rendah	Sangat Rendah		

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik. Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyikapi tuntutan atas perkembangan dan kompleksitas beban kerja dalam memfasilitasi kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik berupaya dengan maksimal untuk mengawal Visi dan Misi kepala Daerah.

2.3.2. Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pemerintahan dan pengawasan selama ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Regulasi yang mengatur terhadap sistem pengelolaan keuangan masih belum baku atau mengalami perubahan, sehingga sistem penganggaran mengalami keterlambatan;
2. Terbatasnya jumlah tenaga yang tersedia;
3. Kualitas SDM aparatur yang masih kurang;
4. Kurangnya pemahaman SDM aparatur akan tugas dan fungsinya;
5. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas;
6. Kurangnya program koordinasi yang baik antara DPRD, Pemda dan Masyarakat;
7. Kurangnya program bahan untuk produk – produk DPRD;

8. Kurangnya Sistem Informasi terhadap Layanan Publik;
9. Kurangnya program kerjasama komunikasi dan informatika

2.3.3. Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan Terhadap Capaian Program Nasional

Adapun Visi Kepala Daerah Kabupaten Gresik adalah: **“Mewujudkan Gresik Baru Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah.”**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif;
2. Membangun infrastruktur yang berdaya saing memakmurkan desa dan menata kota;
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah;
4. Membangun insan Gresik yang unggul yang cerdas, mandiri, sehat, dan berakhlakul karimah;
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik masuk di dalam misi Bupati poin 1, yaitu: **“Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance.”**

Sasaran yang akan dicapai: **“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Akuntabel dengan Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi.”**

2.3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan dan peluang yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah berikut:

a. Tantangan

1. Dinamika kegiatan DPRD yang begitu dinamis.
2. Profesionalisme, Integritas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD.

b. Peluang

1. Adanya upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Sekretariat DPRD.
2. Ketepatan dan kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah.
3. Partisipasi masyarakat yang cukup baik terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewan.
4. Publikasi kegiatan DPRD melalui media sosial.

2.3.5. Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan

Dalam uraian ini akan disampaikan mengenai rekomendasi dan kebijakan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Rekomendasi

Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kapabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik. Peningkatan tersebut diartikan sebagai peningkatan fungsi, peran dan kontribusi operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik untuk mencapai tujuan DPRD Kabupaten Gresik.

b. Kebijakan Strategis

Untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang timbul, diambil langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan potensi data yang ada dan meningkatkan ketepatan perencanaan anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel;
2. Pelaksanaan pembinaan SDM secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi beberapa perubahan perundang-undangan dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama dalam sistem perencanaan dan penganggaran. Pemerintah Kabupaten Gresik perlu mengantisipasi setiap perubahan dengan mempersiapkan SDM yang berdaya saing, selain itu dalam penataan kelembagaan dan penataan personil harus sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Gresik kedepan. Dengan demikian diharapkan pengisian formasi pegawai, jabatan struktural maupun fungsional sesuai dengan beban tugas masing-masing satuan kerja dan kemampuan yang dimiliki pegawai;

3. Peningkatan kemampuan pelayanan administrasi kepada Anggota DPRD dengan ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas – tugas dan disesuaikan dengan aturan – aturan yang berlaku;
4. Peningkatan sarana dan prasarana kantor;
5. Meningkatkan koordinasi yang baik antara DPRD, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
6. Meningkatkan penyediaan buku – buku bacaan pengetahuan dan peraturan perundang – undangan sebagai bahan referensi dalam pembahasan Ranperda;
7. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi kepada masyarakat;
8. Meningkatkan kerjasama dalam penyusunan dan penerbitan profil DPRD dan Liflat DPRD.

BAB III

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GRESIK

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II, Secara keseluruhan pagu indikatif Sekretariat DPRD mengalami kenaikan dari Pagu APBD yang semula sebesar Rp. 88.215.690.388,93,- (Delapan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Sembilan Puluh Tiga Sen) pada Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 menjadi Rp. 110.215.690.388,93,- (Seratus Sepuluh Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Sembilan Puluh Tiga Sen) ada kenaikan sebesar Rp. 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah). Hal ini disebabkan karena pada beberapa komponen belanja yang sudah terealisasi dan selesai pelaksanaannya dilakukan efisiensi belanja.

Adapun rincian rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 yang mengalami penurunan ataupun kenaikan pagu indikatif adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini pada anggaran murni tahun 2025 sebesar Rp. 50.540.188.650,93,- pada anggaran perubahan tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 51.601.701.713,93,-. Ada penambahan anggaran sebesar Rp. 1.061.513.063,-. Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 286.497.041,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 612.497.026,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 325.999.985,- Kenaikan terjadi pada Penambahan Anggaran untuk Belanja Cetak, Makanan dan minuman Rapat, Honorarium Narasumber, Lembur dan Pendalaman Tugas SDM;
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 6.150.963.645,93,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 6.318.963.545,93,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 167.999.900,-. Kenaikan terjadi pada Penambahan Anggaran untuk Belanja Cetak, Lembur dan Pendalaman Tugas SDM;

- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 103.574.915,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 121.072.400,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 17.497.485,-. Kenaikan terjadi pada Penambahan Anggaran untuk Belanja Makanan dan minuman Rapat dan Pendalaman Tugas SDM;
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 845.944.346,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 1.122.764.082,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 276.819.736,-. Kenaikan terjadi pada Penambahan Anggaran untuk Belanja ATK, Sewa Pengharum Ruangan, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Makanan dan minuman Tamu, Jasa Konsultansi Pembuatan Aplikasi;
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 4.496.672.608,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 4.214.774.686,- mengalami penurunan sebesar Rp. 281.897.922,-. Penurunan terjadi karena adanya Rasionalisasi Pengadaan Videotron;
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 2.623.062.400,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 2.750.121.600,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 127.059.200,-. Kenaikan terjadi pada Penambahan Anggaran untuk Belanja Lembur ASN, Tagihan Listrik dan Telepon;
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 1.053.598.484,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 1.359.052.484,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 305.454.000,-. Kenaikan terjadi pada Penambahan Anggaran untuk Belanja Pembayaran STNK dan Pemeliharaan kendaraan Jabatan Pimpinan dan Operasional Kantor, Pemeliharaan Mebelair dan AC;
- 8) Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD. Anggaran murni sebesar Rp.34.869.950.211,- tidak ada perubahan kenaikan maupun penurunan (masih tetap sama dengan anggaran murni);
- 9) Kegiatan Layanan Administrasi DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 109.925.000,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 232.505.679,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 122.580.679,-. Kenaikan terjadi pada Penambahan Anggaran untuk Pengurusan

Administrasi Keanggotaan DPRD, Belanja Makanan dan minuman PAW/HUT RI.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini pada anggaran murni tahun 2025 sebesar Rp. 37.675.501.738,- pada anggaran perubahan tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 58.613.988.675,-. Ada penambahan anggaran sebesar Rp. 20.938.486.937,-. Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 16.645.664.300,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 28.679.167.380,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.033.503.080,-. Kenaikan terjadi pada Penambahan Anggaran untuk Belanja Penggandaan, Honorarium Narasumber, Studi banding dan Rapat Finalisasi Pansus, Kegiatan Rapat Finalisasi Penyusunan NA dan Ranperda Inisiatif dan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran. Anggaran murni sebesar Rp. 677.069.735,- tidak ada perubahan kenaikan maupun penurunan (masih tetap sama dengan anggaran murni);
- 3) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan. Anggaran murni sebesar Rp. 6.424.244.658,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 12.424.244.658,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.000.000.000,-. Kenaikan terjadi pada Penambahan Anggaran untuk Belanja Makanan dan minuman Rapat dan Perjalanan Dinas Komisi;
- 4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 7.894.496.280,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 8.294.645.780,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 400.149.500,-. Kenaikan terjadi pada Penambahan Anggaran untuk Belanja Makanan dan minuman unjuk rasa dan kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD, Cetak foto kegiatan DPRD, Buletin dan Buku Tata Tertib DPRD;
- 5) Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat. Anggaran murni sebesar Rp. 1.787.051.865,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 2.117.051.665,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 329.999.800,-. Kenaikan terjadi pada Penambahan Anggaran untuk Belanja Rapat Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Kegiatan Reses III DPRD;

- 6) Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 35.644.000,- tidak ada perubahan kenaikan maupun penurunan (masih tetap sama dengan anggaran murni);
- 7) Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 4.211.330.900,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 6.386.165.457,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.174.834.557,-. Kenaikan terjadi pada Penambahan Anggaran untuk Belanja Perjalanan Dinas Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Perjalanan Dinas Pimpinan DPRD.

Adapun rincian uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif pada perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Target				Selisih	Ket
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Satuan	Fisik		Keuangan			
							Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							106.574.493.139,93	110.215.690.388,93	3.641.197.249,00	
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							51.540.923.306,93	51.601.701.713,93	60.778.407,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					30 Dokumen	30 Dokumen	459.323.126,00	612.497.026,00	153.173.900,00	
1	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	202.961.850,00	307.549.550,00	104.587.700,00	
2	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	17 Laporan	17 Laporan	172.674.000,00	219.362.100,00	46.688.100,00	
3	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	83.687.276,00	85.585.376,00	1.898.100,00	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					15 Dokumen	15 Dokumen	6.248.373.445,93	6.318.963.545,93	70.590.100,00	
4	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Orang	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	5.975.367.445,93	5.975.367.445,93	-	
5	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tercukupinya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1238 Dokumen	1238 Dokumen	231.208.000,00	302.998.900,00	71.790.900,00	

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Target				Selisih	Ket
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Satuan	Fisik		Keuangan			
							Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercukupinya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	5 Laporan	5 Laporan	17.858.000,00	16.057.200,00	(1.800.800,00)	
7	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tercukupinya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	9 Laporan	9 Laporan	15.690.000,00	17.115.000,00	1.425.000,00	
8	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tercukupinya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.250.000,00	7.425.000,00	(825.000,00)	
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					17 Dokumen	17 Dokumen	142.895.530,00	121.072.400,00	(21.823.130,00)	
9	4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tercukupinya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	5.090.500,00	6.072.400,00	981.900,00	
10	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tercukupinya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	13 Orang	13 Orang	117.361.030,00	100.000.000,00	(17.361.030,00)	
11	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tercukupinya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	5 Orang	5 Orang	20.444.000,00	15.000.000,00	(5.444.000,00)	
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					230 Dokumen 3 Tingkat	230 Dokumen 3 Tingkat	990.928.309,00	1.122.764.082,00	131.835.773,00	
12	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tercukupinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	1 Paket	1 Paket	92.650.000,00	92.650.000,00	-	
13	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tercukupinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	1 Paket	1 Paket	180.375.278,00	208.316.425,00	27.941.147,00	
14	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tercukupinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	1 Paket	1 Paket	74.631.712,00	86.231.712,00	11.600.000,00	

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Target				Selisih	Ket
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Satuan	Fisik		Keuangan			
							Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
15	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tercukupinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	74 Paket	74 Paket	82.254.324,00	100.000.000,00	17.745.676,00	
16	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tercukupinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	5 Paket	5 Paket	182.723.575,00	164.838.575,00	(17.885.000,00)	
17	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tercukupinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	132 Laporan	132 Laporan	103.515.500,00	122.460.850,00	18.945.350,00	
18	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercukupinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	15 Laporan	15 Laporan	165.145.920,00	165.145.920,00	-	
19	4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	Tercukupinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	109.632.000,00	183.120.600,00	73.488.600,00	
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2 Unit	2 Unit	4.984.288.601,00	4.214.774.686,00	(769.513.915,00)	
20	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	2 Unit	2 Unit	4.984.288.601,00	4.214.774.686,00	(769.513.915,00)	
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					137 Laporan	137 Laporan	2.630.492.000,00	2.750.121.600,00	119.629.600,00	
21	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	50 Laporan	50 Laporan	27.716.000,00	32.640.000,00	4.924.000,00	
22	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	325.560.000,00	423.624.000,00	98.064.000,00	
23	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	75 Laporan	75 Laporan	2.277.216.000,00	2.293.857.600,00	16.641.600,00	
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					85 Unit	85 Unit	1.062.532.084,00	1.359.052.484,00	296.520.400,00	

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Target				Selisih	Ket
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Satuan	Fisik		Keuangan			
							Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
24	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	4 Unit	4 Unit	171.341.000,00	259.341.000,00	88.000.000,00	
25	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	15 Unit	15 Unit	229.000.000,00	343.470.000,00	114.470.000,00	
26	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	50 Unit	50 Unit	5.000.000,00	104.200.000,00	99.200.000,00	
27	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	10 Unit	10 Unit	109.795.000,00	115.895.000,00	6.100.000,00	
28	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	2 Unit	2 Unit	269.219.000,00	259.981.100,00	(9.237.900,00)	
29	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Sarana dan PrasaranaJumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	4 Unit	4 Unit	278.177.084,00	276.165.384,00	(2.011.700,00)	
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					50 Orang	50 Orang	34.869.950.211,00	34.869.950.211,00	-	
30	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Orang/ Bulan	50 Orang/bul an	50 Orang/bul an	34.218.950.211,00	34.218.950.211,00	-	
31	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Paket	5 Paket	5 Paket	576.000.000,00	576.000.000,00	-	

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Target				Selisih	Ket
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Satuan	Fisik		Keuangan			
							Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
32	4.02.01.2. 15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Orang	50 Orang	50 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
	4.02.01.2. 16	Layanan Administrasi DPRD					10 Laporan	10 Laporan	152.140.000,00	232.505.679,00	80.365.679,00	
33	4.02.01.2. 16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Terpenuhinya Layanan Administrasi DPRD	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
34	4.02.01.2. 16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terpenuhinya Layanan Administrasi DPRD	Laporan	5 Laporan	5 Laporan	102.140.000,00	182.505.679,00	80.365.679,00	
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							55.033.569.833,00	58.613.988.675,00	3.580.418.842,00	
	4.02.02.2. 01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD					16 Dokumen	16 Dokumen	20.014.431.727,00	28.679.167.380,00	8.664.735.653,00	
35	4.02.02.2. 01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyusunan regulasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terfasilitasinya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	387.161.000,00	235.755.200,00	(151.405.800,00)	
36	4.02.02.2. 01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyusunan regulasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terfasilitasinya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.809.032.300,00	2.437.304.400,00	(371.727.900,00)	
37	4.02.02.2. 01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyusunan regulasi DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Terfasilitasinya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	790.000.000,00	284.667.200,00	(505.332.800,00)	
38	4.02.02.2. 01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyusunan regulasi DPRD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan proses penyusunan naskah akademik dan Ranperda inisiatif DPRD	Terfasilitasinya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2.500.825.827,00	2.181.738.540,00	(319.087.287,00)	
39	4.02.02.2. 01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyusunan regulasi DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Terfasilitasinya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	224.647.800,00	-	(224.647.800,00)	

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Target				Selisih	Ket
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Satuan	Fisik		Keuangan			
							Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
40	4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyusunan regulasi DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Orang	120.000 orang	120.000 orang	13.302.764.800,00	23.539.702.040,00	10.236.937.240,00	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran					26 Dokumen	26 Dokumen	1.788.365.000,00	677.069.735,00	(1.111.295.265,00)	
41	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Terfasilitasinya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	355.271.450,00	48.676.075,00	(306.595.375,00)	
42	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terfasilitasinya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	351.002.650,00	48.903.060,00	(302.099.590,00)	
43	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Terfasilitasinya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	346.278.450,00	244.437.800,00	(101.840.650,00)	
44	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Terfasilitasinya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	356.102.550,00	263.421.500,00	(92.681.050,00)	
45	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Terfasilitasinya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	46.754.700,00	24.887.600,00	(21.867.100,00)	
46	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terfasilitasinya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	332.955.200,00	46.743.700,00	(286.211.500,00)	
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					251 Laporan	251 Laporan	13.199.944.000,00	12.424.244.658,00	(775.699.342,00)	
47	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terfasilitasinya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	60 Laporan	60 Laporan	3.001.145.250,00	3.031.139.725,00	29.994.475,00	
48	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terfasilitasinya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	60 Laporan	60 Laporan	3.179.565.900,00	3.114.098.678,00	(65.467.222,00)	

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Target				Selisih	Ket
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Satuan	Fisik		Keuangan			
							Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
49	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terfasilitasinya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	60 Laporan	60 Laporan	3.071.002.750,00	3.048.817.492,00	(22.185.258,00)	
50	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terfasilitasinya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	60 Laporan	60 Laporan	3.205.964.900,00	3.115.801.339,00	(90.163.561,00)	
51	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terfasilitasinya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	343.878.350,00	39.599.224,00	(304.279.126,00)	
52	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terfasilitasinya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	29.217.200,00	17.364.600,00	(11.852.600,00)	
53	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terfasilitasinya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	369.169.650,00	57.423.600,00	(311.746.050,00)	
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD					292 Dokumen	292 Dokumen	8.833.032.217,00	8.294.645.780,00	(538.386.437,00)	
54	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Nilai Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Terfasilitasinya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	3.973.465.156,00	3.810.752.500,00	(162.712.656,00)	
55	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Nilai Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah tenaga ahli Fraksi	Terfasilitasinya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Orang	7 Orang	7 Orang	252.530.000,00	252.530.000,00	-	
56	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Nilai Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terfasilitasinya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	152.490.000,00	179.365.000,00	26.875.000,00	
57	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Nilai Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Terfasilitasinya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	383.042.400,00	132.713.000,00	(250.329.400,00)	
58	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Nilai Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Terfasilitasinya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Dokumen	261 Dokumen	261 Dokumen	4.071.504.661,00	3.919.285.280,00	(152.219.381,00)	
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					7 Dokumen	7 Dokumen	2.269.808.050,00	2.117.051.665,00	(152.756.385,00)	
59	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Terfasilitasinya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	768.392.200,00	607.274.500,00	(161.117.700,00)	

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Target				Selisih	Ket
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Satuan	Fisik		Keuangan			
							Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pengawasan DPRD		Masyarakat							
60	4.02.02.2. 05.0003	Pelaksanaan Reses	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Terfasilitasinya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.501.415.850,00	1.509.777.165,00	8.361.315,00	
	4.02.02.2. 06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					2 Laporan	2 Laporan	45.960.000,00	35.644.000,00	(10.316.000,00)	
61	4.02.02.2. 06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Terfasilitasinya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	45.960.000,00	35.644.000,00	(10.316.000,00)	
	4.02.02.2. 08	Fasilitasi Tugas DPRD					128 Dokumen	128 Dokumen	8.882.028.839,00	6.386.165.457,00	(2.495.863.382,00)	
62	4.02.02.2. 08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Nilai Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terfasilitasinya Tugas DPRD	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.344.540.000,00	3.002.865.000,00	(341.675.000,00)	
63	4.02.02.2. 08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Nilai Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Fraksi. Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Terfasilitasinya Tugas DPRD	Laporan	6 Laporan	6 Laporan	386.402.400,00	105.205.000,00	(281.197.400,00)	
64	4.02.02.2. 08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Nilai Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terfasilitasinya Tugas DPRD	Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	18.962.400,00	14.762.400,00	(4.200.000,00)	
65	4.02.02.2. 08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Nilai Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terfasilitasinya Tugas DPRD	Dokumen	86 Dokumen	86 Dokumen	5.132.124.039,00	3.263.333.057,00	(1.868.790.982,00)	
TOTAL									106.574.493.139,93	110.215.690.388,93	3.641.197.249,00	

BAB IV

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja DPRD yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, indikator, target kinerja dan pagu anggaran, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan.

Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Gresik Tahun 2025 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025.

Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dan mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD sehingga agenda kegiatan DPRD dapat berjalan dengan baik dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan.

Gresik, Juli 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK



Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680412 199203 1 011